KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan
Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

● FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rencana membangun apartemen khusus untuk anggota dewan. Keputusan ini disepakati pimpinan DPR setelah rencana pembangunan apartemen menjadi polemik. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pembatalan ini untuk kepentingan rakyat.

"Kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final, kita putuskan bersama," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Dari pembahasan pimpinan DPR, perumahan anggota dewan di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan, dinilai masih layak. Kedua lokasi perumahan anggota disebut masih dapat menjangkau lokasi Kompeks Parlemen untuk menghadiri rapat. "Jadi, saya rasa itu kita batalkan, *enggak* perlu ada pembangunan-pembangunan apartemen," kata Novanto.

Meskipun rencana pembangunan dibatalkan, DPR tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru untuk menampung anggota dewan. Novanto mengatakan, pembangunan gedung baru merupakan rencana penataan Kompleks Parlemen sejak lama. Menurut dia, kondisi Gedung Nusantara I, tempat anggota dewan berkantor, sudah tidak memadai.

"Gedung yang sekarang ini yang ditempati ini hanya muat jumlahnya sangat minim, yaitu dengan kapasitas 800-1.400 dan sekarang ini tujuh daripada TA (tenaga ahli) belum lagi alat-alat dan itu yang disampaikan kepada saya, minta dipertimbangkan untuk bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya.

Wakil Ketua Fahri Hamzah yang juga ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan mengakui pembatalan rencana pembangunan apartemen anggota dewan karena banyaknya protes terhadap DPR.

"Soal apartemen, karena Pak Novanto bilang begitu karena Pak Novanto *enggak* mau ribut," ujar Fahri.

Fahri mengaku heran dengan kritikan yang ditujukan ke DPR karena rencana pembangunan apartemen khusus anggota dewan.

Menurut dia, pembangunan apartemen baru sebatas wacana dan ide, tapi hal itu sudah ditanggapi negatif oleh semua pihak. Padahal, menurut dia, pemerintah lebih harus disoroti dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

"Pemerintah mau *mindahin* ibu kota ya kita biasa-biasa aja, santai aja. Masa bangun satu gedung aja kita ribut," kata dia.

Gedung DPD

Terpisah, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) bersikukuh DPD ingin membangun gedung baru. Menurut OSO, gedung baru dibutuhkan untuk menampung aspirasi dari konstituen daerah yang jauh-jauh ke gedung DPD. Kondisi gedung yang ada saat ini dinilai sudah tidak memadai.

Dia mengatakan, anggaran pembangunan gedung DPD tidak terlalu besar dan sudah diajukan sejak lama. "Sudah hampir sembilan tahun, jumlahnya *enggak* sampai Rp 1 triliun," ujarnya.

Wakil ketua MPR RI ini mengklaim pemerintah sudah memahami terkait kebutuhan tersebut. Terlebih, anggaran yang dibutuhkan dinilai tidak mahal. Meskipun tidak otomatis mengakomodasi keinginan tersebut.

DPD juga tidak ingin memaksa Kementerian Keuangan untuk segera merealisasikan keinginan pembangunan gedung baru DPD.

"Pemerintah memahami itu tapi kita *enggak* bisa maksa. Mudah-mudahan pemerintah menghayati itu, menkeu (menteri keuangan) menyadari itu," kata dia.

■ **ed:** agus raharjo